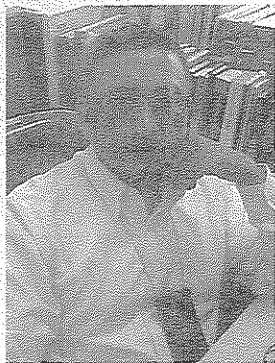


Pemolisian oleh Lembaga Kepolisian dan Politik Praktis di Indonesia

Bhakti Suhendarwan*



Abstrak

Sebagian masyarakat masih menganggap polisi sebagai alat penguasa, hal ini tidak terlepas dari tindakan pemolisian yang terkadang dianggap tidak pro kepada rakyat. Sayangnya, situasi ini terkadang dimanfaatkan bagi entitas politik untuk mendukung tujuan politiknya, baik dengan cara pemanfaatan sumber daya kepolisian guna menunjang aktivitas politiknya, atau melakukan pembunuhan karakter, contohnya dengan menyerang kelemahan sebuah lembaga kepolisian seperti tindakan kekerasan dan korupsi, dimana hal ini secara tidak langsung akan mempermalukan pihak yang pada saat itu berkuasa, dan akan memberikan keuntungan bagi pihak oposisi. Artikel ini akan memberikan analisa

tentang pengaruh politik praktis terhadap pelaksanaan tugas kepolisian khususnya di Indonesia. Hubungan antara tugas kepolisian dan politik praktis merupakan resiko yang tidak bisa dihindari, namun hal tersebut tidak akan menjadi masalah selama lembaga kepolisian masih memegang asas universal pemolisian, dan mampu memberikan atensi penuh kepada masyarakat umum sebagai pemberi mandat.

Kata Kunci : Pemolisian Lembaga Kepolisian, Politik Praktis

Pendahuluan

Ketika Undang – Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 menyatakan bahwa Polri berada di bawah presiden,¹ ada konsekuensi bahwa pemolisian akan terekspose dengan situasi politik praktis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokoknya. Sayangnya, prediksi ini relatif terbukti dengan adanya temuan di suatu satuan kerja Polri, dimana terjadi sebuah kasus adanya perintah langsung dari pimpinan satuan kerja tersebut untuk mendukung entitas politik tertentu.² Meskipun perkara ini akhirnya dapat

diklarifikasi oleh pihak Polri, beberapa pihak menganggap hal ini sebagai sebuah indikasi bahwa Polri ikut “bermain” dalam kegiatan politik di Indonesia.

Makalah ini akan mengkaji tentang hubungan antara fungsi pemolisian dan politik praktis di Indonesia . Dalam penulisan ini, akan dibahas mengenai adanya kecenderungan partai politik yang berkuasa dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada guna menyokong kekuasaannya, tendensi dimana polisi terpengaruh dalam lingkaran kekuasaan politik, dan deskripsi dari situasi pemolisian di negara lain yang mempunyai situasi yang hampir serupa. Dari pembahasan ini diharapkan timbulnya pemahaman berimbang antara realita pemolisian

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia Pasal 8.

2. Aninditha Maharrani *Mabes Polri akan Jumpa Pers Soal VCD dukung Mega* (26 Juli 2004) Detik.com < <http://news.detik.com/read/2004/07/26/10454>

* Kompol. Bhakti Suhendarwan, SIK, MTCP, CFE, alumni PTIK angkatan 48 yang pada saat ini bertugas sebagai penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Komentar atas tulisan di bhakti.suhendarwan@gmail.com atau bhakti.suhendarwan@kpk.go.id

dan hubungannya dengan politik praktis di Indonesia. Diskusi yang muncul dari pembahasan ini diharapkan mampu mengajak pembaca untuk lebih arif menyikapi permasalahan yang terjadi di tubuh Kepolisian RI dan mencari solusi yang terbaik demi perkembangan institusi Polri kedepan.

Polisi dan Kekuasaan

Polisi merupakan sebuah fungsi tugas yang spesifik dan selalu hadir dalam kehidupan sebuah masyarakat. Sebagaimana diterangkan dalam website milik London Metropolitan Police, Polisi adalah sebuah fungsi yang selalu hadir dalam berbagai macam bentuk dan nama, namun mempunyai fungsi yang seragam yaitu pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan menjamin adanya rasa aman.³ Karena pentingnya fungsi ini, maka kemudian fungsi tadi diwujudkan dalam sebuah kelembagaan, contohnya lembaga Kepolisian Republik Indonesia atau yang lebih sering disebut dengan Polri. Sayangnya, peran ini sering disalahgunakan oleh elite politik yang berkuasa, bahkan, seorang kriminolog berpendapat bahwa "Polisi dijalan memang tidak dapat mengatasi kejahatan, tapi kehadirannya dapat memenangkan pemilihan umum".⁴ Meskipun menurut penulis pendapat tersebut tidak seluruhnya tepat karena argumen tersebut lebih cenderung mengedepankan pendapat pribadi tanpa didukung data yang jelas. Akan tetapi, pendapat tadi dapat dijadikan acuan bagi penelitian lebih lanjut.

Memang, banyak keunggulan yang dimiliki oleh sebuah lembaga kepolisian. Sebut saja jumlah personil yang besar dan memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa, kewenangan untuk menggunakan senjata api, intelijen dan lain sebagainya. Dengan berbagai

keunggulan itu, wajar apabila sumber daya yang ada di kepolisian merupakan elemen penting guna melanggengkan jalannya kekuasaan dari pihak yang pada saat itu berkuasa.

Penjelasan diatas diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Scraton terhadap proses pemolisian yang dilaksanakan di Inggris pada saat pemerintahan Perdana Menteri Margaret Thatcher. Scraton menjelaskan, bahwa pada saat penelitian berlangsung, ada temuan bahwa pemerintah Inggris seakan - akan menutup mata terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian Inggris. Terutama apabila hal tersebut dilakukan terhadap lawan politiknya. Bahkan cenderung melakukan dehumanisasi dan demonisasi terhadap pihak - pihak yang berseberangan dengan pemerintah.⁵

Lebih lanjut lagi, kecenderungan memanfaatkan institusi kepolisian serta kekuatan bersenjata demi kelangsungan kekuasaan, akan dengan mudah bertransformasi menjadi suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh negara (*state crime*). *State crime* sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih banyak diperdebatkan oleh para kriminolog karena ketiadaan definisi yang pasti,⁶ dan mudah sekali disamarkan bahkan dilegalkan menjadi sebetuk aturan atau perundangan yang pastinya dibuat oleh kelompok penguasa. Hingga saat ini apa yang dimaksud kejahatan negara itu sendiri masih tidak jelas, dikarenakan belum dapatnya para peneliti untuk dapat membuat rumusan global terkait kejahatan negara.⁷

Fakta di Indonesia

Meskipun tidak ada bukti konkrit yang menjelaskan keterlibatan Polri dalam hal

3. History of the Metropolitan Police (accessed 4th June 2012) Metropolitan Police <<http://www.met.police.uk/history/definition.htm>> [author's trans].
4. A goldsmith, M Israel & K Daly (eds) *Crime and Justice : A Guide to Criminology, 3rd edition* (Thomson Lawbook Co, 2006) 373, 93 [author's trans].

5. Penny Green and Tony Ward, *State Crime : Governments, Violence and corruption* (Pluto Press, 2004) 80 [author's trans].
6. Ira Sharkansky, 'A State Action May Be Nasty but Is Not Likely to Be a Crime' in Jeffrey Ian Ross (ed), *Controlling State Crime: An Introduction* (Garland Reference Library of Social Science, 1995) 35, 39 [author's trans].
7. Jeffrey Ian Ross and Dawn L Rothe, 'Ironies of Controlling State Crime' (2008) 36 *International Journal of Law, Crime and Justice* 196, 197 [author's trans].

penggunaan kekuatan dan sumber dayanya terkait dengan pelaksanaan politik praktis di Indonesia, model pemanfaatan lembaga penegak hukum guna memberikan dukungan, atau minimal dimanfaatkan dalam pelaksanaan politik praktis sudah terimplementasi dalam kehidupan politik negeri ini. Mungkin masih kita ingat akan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada periode kepemimpinan yang kedua dianggap berhasil menangani kasus – kasus besar terkait dengan penyelenggara negara. Hal tersebut kalau boleh dibilang mengakomodir rasa keadilan masyarakat yang merasa bahwa kalangan elit tidak pernah atau tidak dapat tersentuh hukum. Jeli melihat hal itu, ketika Pemilihan Umum Tahun 2009, ramai – ramai beberapa partai mengklaim bahwa KPK merupakan produk keputusan politik pada saat partainya berkuasa.⁸ Dari fakta ini dapat disimpulkan, meskipun secara tidak langsung memanfaatkan lembaga penegak hukum yang sedang naik daun tersebut, perilaku para aktivis politik tersebut mencerminkan keinginan yang kuat untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada, yang dianggap mampu mendongkrak perolehan suara dan meraih kekuasaan.

Pemolisian terkait erat dengan Politik

Dari pembahasan diatas dapat dilihat, bahwa lembaga yang memiliki fungsi kepolisian dan politik praktis memiliki hubungan yang sangat erat. Kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan, tersedianya sumber daya yang besar, dan wewenang upaya paksa merupakan daya tarik yang mendorong entitas politik berlomba – lomba untuk memanfaatkan lembaga – lembaga tersebut. Menariknya, fenomena ini terjadi bukan hanya terjadi di negara – negara berkembang dimana situasi politik dan perekonomiannya masih jauh dari stabil, namun juga terjadi di negara – negara maju.

Fakta ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh beberapa akademisi yang mendalami bidang politik dan kepolisian, hasil kesimpulan mereka relatif sama, bahwa keterkaitan polisi dengan entitas politik adalah tidak terelakkan. Salah satunya adalah Green dan Ward yang menyatakan bahwa polisi beroperasi dalam lingkungan dan struktur yang kompleks, dimana polisi tidak hanya berurusan dengan beragam situasi dan keadaan sosial, namun harus juga terkait dengan para elit politik, institusi sosial dan lembaga kenegaraan.⁹

Contoh lainnya dapat dilihat dari pelaksanaan pemolisian di negara lain. Contohnya Belgia, terkait dengan sistem pemolisiannya, kepolisian Belgia sudah menerapkan apa yang disebut “*excellent police function*” sebagai kerangka kerja manajemen dan standar minimum praktek pemolisian.¹⁰ Dalam kerangka kerja tersebut jelas disebutkan bahwa organisasi polisi terdiri dari lima unsur, yaitu manajemen dan kepemimpinan, kebijakan dan politik, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana, dan manajemen proses kerja.¹¹ Contoh ini merupakan bukti, bahwa secara institusional, kepolisian Belgia sadar bahwa proses bisnis organisasi mereka sangat bergantung dari kebijakan politik dari pemerintah atau pihak yang berkuasa.

Menemukan profil ideal

Pertanyaannya adalah, bagaimana Polri dapat menemukan profil idealnya dalam situasi yang tidak terelakkan sebagaimana penjelasan dalam diskusi sebelumnya? Apakah Polri akan hidup sebagai bayang – bayang penguasa negara, dan hanya akan bekerja sesuai dengan arah kebijakan dan politik penguasa, ataukah

8. PDI-P Anggap Pemerintah Gagal (22 Januari 2009) Tempo.co <<http://www.tempo.co/read/news/2009/01/22/055156502/PDI-P-Anggap-Pemerintah-Gagal/2>> .

9. Green and Ward, above n 5 79.

10. Sybille Smeets and Carrol Tange, ‘ community Policing in Belgium , The vicissitudes of the Development of a police model’ in Dominique wisler and Lhekwoaba D . Onwudiwe (eds), *Community Policing international Patterns and comparative perspectives* (CRC Press, 2009) 125, 134 [author’s trans] .

11. Ibid.

Polri tetap memegang jati diri universal sebagai lembaga yang dibebani fungsi kepolisian. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut penulis penting untuk meninjau kembali doktrin kepolisian modern yang pernah ditulis oleh Sir Robert Peel atau yang sering disebut dengan *The Peelian Principles*. Pada prinsip ketujuh disebutkan bahwa polisi sebenarnya secara historis hanyalah masyarakat biasa yang diberi bayaran untuk memberikan perhatian penuh terhadap tugas yang dibebankan kepadanya yaitu menjaga ketertiban dan mencegah kejahatan.¹²

Prinsip diatas penting sebagai acuan Polri dalam mengambil sikap. Apapun bentuk intervensi dan konflik kepentingan dari elit politik harus disikapi Polri dengan lebih mengutamakan layanan kepada komunitas yang lebih besar, yaitu masyarakat umum sebagai pemberi mandat kepada Kepolisian RI. Namun harus disadari bahwa Polri tidak bisa sepenuhnya berdiri sendiri. Segala tindakan Polri harus mendapatkan legitimasi dari seluruh entitas, baik entitas politik maupun entitas publik, yang mana hal ini juga tertuang dalam *The Peelian Principles*. Kegagalan untuk mendapatkan legitimasi akan mengakibatkan Polri akan menjadi "musuh bersama" dari politisi dan publik ketika dalam pelaksanaan tugasnya, polisi harus menggunakan upaya paksa yang dianggap berefek negatif dan bertentangan dengan keinginan masyarakat umum. Dimana, hal tersebut akan menjadi sasaran empuk bagi elit politik dari pihak oposisi untuk menyerang pihak berkuasa.

Dari diskusi diatas dapat disimpulkan bahwa menentukan profil ideal Polri dalam hubungannya dengan politik praktis di Indonesia tidaklah mudah. Perlu kecerdikan dan kejelian dari pimpinan Polri untuk menentukan arah dan sikap organisasi menyikapi fluktuasi politik di Indonesia. Akan tetapi kita harus bersyukur

bahwa sebagai Polisi, Polri memiliki nilai – nilai kelembagaan universal yang dapat dijadikan pedoman dalam mengambil sikap dalam pelaksanaan tugas, dan jalannya organisasi.

Kesimpulan

Hubungan antara pelaksanaan tugas kepolisian dengan politik praktis adalah tidak terhindarkan. Hal ini disebabkan karena dari sisi politik praktis, Polisi dengan segala kewenangan dan kapasitasnya merupakan sumber daya berharga yang sayang apabila tidak dimanfaatkan. Sedangkan, secara natural, kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya selalu terkait dengan dengan banyak komunitas, kelompok, dan grup masyarakat yang masing – masing memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Namun, resiko dari kondisi yang tidak terelakkan tersebut dapat diminimalisir dengan cara kembali ke fungsi universal kepolisian, yaitu sebagai masyarakat biasa yang diberi tugas khusus untuk menjaga keamanan, ketertiban dan memberikan pengayoman. Dengan kembali ke fondasi awal tujuan adanya sebuah lembaga kepolisian, suatu lembaga kepolisian akan lebih mudah menentukan sikap dan pola tindak sesuai dengan perkembangan situasi.

Yang lebih penting adalah kemampuan dari institusi kepolisian tersebut untuk dapat membuat penilaian terhadap situasi atau fluktuasi politik yang berlangsung. Analisa ini penting karena bagaimanapun juga, keabsahan dari suatu tindakan kepolisian ditentukan oleh legitimasi publik dimana didalamnya termasuk para elit politik. Dengan menggunakan analisa tersebut, pimpinan lembaga kepolisian dapat mengambil kebijakan – kebijakan penting terkait hubungan lembaganya dengan entitas politik, dengan tidak melupakan fungsi hakiki kepolisian yaitu melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, serta sebagai lembaga penegak hukum. (***)

12. Sandra Nazemi Sir Robert Peel's Nine Principals of Policing (accessed 4th June 2012) Los Angeles Community Policing <<http://www.lacp.org/2009-Articles-Main/062609-Peels9Principals-SandyNazemi.htm>> [author's trans].